

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai preservasi arsip kartografi di Dinas Arpus Kota Semarang, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut.

Pertama, pelaksanaan preservasi arsip kartografi di Dinas Arpus Kota Semarang mengacu pada Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Kartografi dan Kearsitekturan, Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Kearsipan, Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 35 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemeliharaan Arsip Dinamis, tanpa didukung regulasi atau SOP khusus di tingkat daerah untuk arsip kartografi. Arsip kartografi yang dikelola di antaranya terdiri dari peta kelurahan, peta kecamatan, peta batas wilayah, peta kuno, peta batas pantai, dan arsip kearsitekturan, dengan jumlah keseluruhan diperkirakan mencapai hampir 500 arsip dan rentang usia dari sekitar tahun 1970-an hingga 2015, yang turut memengaruhi tingkat kerentanan fisiknya.

Preservasi preventif dijalankan melalui pengendalian suhu dan kelembaban ruang penyimpanan, penyediaan sarana penyimpanan yang disesuaikan dengan bentuk arsip (tabung untuk arsip gulungan, lemari gantung untuk arsip berukuran besar, custom box untuk arsip berbentuk buku), penanganan arsip termasuk pemeriksaan berkala sarana penyimpanan, pengendalian hama terpadu melalui fumigasi rutin setiap enam bulan, serta pembatasan akses fisik. Preservasi kuratif dilaksanakan melalui pembersihan dengan alkohol 70% yang didahului uji coba, serta kegiatan restorasi yang mengikuti SOP Restorasi Arsip yang berlaku umum, menggunakan bahan seperti tisu Jepang, metil selulosa, dan magnesium karbonat, meskipun kegiatan tersebut masih dilakukan di dalam depo karena belum tersedia ruang restorasi khusus. Reproduksi atau alih media dilakukan melalui dua metode, yaitu kerja sama dengan pihak ketiga dan pemindaian mandiri menggunakan

kamera ponsel, sebagai konsekuensi dari keterbatasan *scanner* yang hanya mampu menangani arsip berukuran maksimal A4. Alih media berfungsi ganda, sebagai upaya preventif dengan mengurangi frekuensi penanganan fisik arsip asli, dan sebagai upaya kuratif dengan memprioritaskan arsip yang kondisinya rapuh atau bernilai historis tinggi. Autentikasi arsip hasil alih media dilakukan melalui pembubuhan *digital watermark* dan logo Pemerintah Kota Semarang, dengan layanan akses yang mengarahkan pengguna untuk memeriksa arsip melalui sistem SELARAS terlebih dahulu. Evaluasi kegiatan preservasi dilakukan secara berkala melalui evaluasi kinerja triwulanan dan audit eksternal dari Dinas Arsip dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah, didukung pelatihan restorasi bagi arsiparis, meskipun pelatihan tersebut belum secara khusus membahas penanganan arsip kartografi.

Kedua, tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan preservasi arsip kartografi bersifat struktural dan saling berkaitan. Dari sisi regulasi, belum tersedianya Peraturan Wali Kota atau SOP khusus arsip kartografi menyebabkan pedoman yang digunakan belum sepenuhnya mengakomodasi karakteristik arsip kartografi. Dari sisi sarana, prasarana, dan anggaran, kendala utama meliputi ketiadaan *scanner* A0, keterbatasan lemari gantung, dan belum tersedianya ruang restorasi khusus, yang diperparah oleh belum tercantumnya *scanner* A0 dalam Standar Satuan Harga sehingga tidak dapat dianggarkan melalui SIPD. Sebagai responsnya, dinas telah mengupayakan pengadaan sarana tersebut melalui pengajuan kajian kebutuhan dan bukti harga kepada dinas terkait dan BPKAD, meskipun sampai penelitian ini dilakukan usulan tersebut belum mendapat tindak lanjut. Dari sisi sumber daya manusia, tantangannya bukan terletak pada jumlah arsiparis, melainkan pada ketiadaan tenaga IT internal sehingga penanganan kendala teknis sistem SELARAS bergantung pada koordinasi dengan DISKOMINFO, serta pada belum tersedianya pelatihan yang secara khusus membahas penanganan arsip kartografi. Dari sisi teknis alih media, penggunaan kamera ponsel untuk arsip berukuran besar menyebabkan proses pemindaian dan pengeditan memakan waktu lama, menghasilkan resolusi sekitar 300–500 dpi yang berada di bawah standar ideal 600 dpi, serta terbatas pada format keluaran PDF. Di

tengah berbagai kendala tersebut, kerja sama dan konsultasi dengan pihak eksternal, seperti Pemerintah Kota Semarang dan dinas terkait untuk akuisisi arsip, Dinas Arsip dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah untuk konsultasi kebijakan, pihak percetakan untuk pemindaian, serta Rumah PoHan untuk penanganan dan restorasi, menjadi strategi utama yang ditempuh dinas untuk mengatasi keterbatasan pengetahuan dan fasilitas internal.

Secara keseluruhan, temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa preservasi arsip kartografi di Dinas Arpus Kota Semarang dijalankan melalui strategi preservasi yang bersifat adaptif, memadukan preservasi preventif, kuratif, dan alih media, di tengah ketiadaan regulasi dan sarana-prasarana yang secara khusus dirancang untuk karakteristik arsip kartografi. Adaptabilitas ini tercermin dari kombinasi pemanfaatan sumber daya internal yang terbatas dengan kerja sama eksternal sebagai strategi mengatasi kesenjangan antara kebutuhan ideal dan kondisi yang tersedia, sejalan dengan argumen utama yang dibangun dalam penelitian ini.

5.2 Saran

Hasil penelitian dan kesimpulan yang diuraikan di atas membawa beberapa rekomendasi yang diharapkan dapat dipertimbangkan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan preservasi arsip kartografi, khususnya di Dinas Arpus Kota Semarang.

1. Dinas Arpus Kota Semarang disarankan untuk segera menyusun SOP khusus yang mengatur preservasi arsip kartografi, mengingat karakteristik fisiknya berbeda dari arsip tekstual pada umumnya.
2. Dinas Arpus Kota Semarang perlu menindaklanjuti usulan pengadaan *scanner* berukuran besar (A0) melalui koordinasi lebih lanjut dengan BPKAD terkait pencantuman item tersebut dalam Standar Satuan Harga. Selain itu, perlu dipertimbangkan pula penambahan sarana penyimpanan arsip kartografi berukuran besar yang mengarah pada standar penyimpanan horizontal (*map cabinet/flat file*), sebagai alternatif jangka panjang dari metode penyimpanan gantung yang saat

ini masih terbatas jumlahnya, disertai penyediaan ruang restorasi khusus yang terpisah dari ruang penyimpanan arsip.

3. Dari sisi sumber daya manusia, perlu dipertimbangkan penyediaan tenaga IT internal atau penguatan koordinasi rutin dengan DISKOMINFO untuk menangani kendala teknis sistem SELARAS, serta penyelenggaraan pelatihan yang secara khusus membahas penanganan preservasi arsip kartografi, mengingat pelatihan yang tersedia saat ini masih bersifat umum.
4. Kerja sama dan konsultasi dengan pihak eksternal, seperti Dinas Arsip dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah dan Rumah PoHan, disarankan untuk terus diperkuat dan didokumentasikan secara lebih sistematis, mengingat kerja sama tersebut selama ini berperan penting dalam mengatasi keterbatasan pengetahuan dan fasilitas internal, sembari menunggu terpenuhinya kebutuhan regulasi dan sarana-prasarana yang lebih permanen.
5. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi lembaga kearsipan daerah lainnya dalam mengembangkan praktik preservasi arsip kartografi.